

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang didirikan oleh pemilik perusahaan atau seorang investor pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Maka tujuan perusahaan didirikan, yakni: memaksimalkan kekayaan atau keuntungan bagi karyawan, masyarakat sekeliling perusahaan dan terutama pemegang saham. Kesejahteraan perusahaan dapat dilihat dari bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan kekayaannya dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Persaingan bisnis di berbagai industri berlangsung dengan begitu kuat dan begitu cepat karena sejalan dengan terjadinya perubahan lingkungan yang dinamis, kompetisi yang semakin ketat, perubahan selera konsumen dari waktu ke waktu, kemajuan teknologi yang begitu pesat serta perubahan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan berbagai kesempatan, peluang dan juga tantangan serta ancaman dalam berbagai sektor bisnis di segala bidang.

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan *Food Beverages*

No.	Nama Perusahaan	ROE			
		Des 2012	Des 2013	Des 2014	Des 2015
1.	PT. Akasha Wira Internasional Tbk. (ADES)	39,87	21,02	10,49	10,00
2.	PT. Tri Banyan Tirta Tbk. (ALTO)	8,56	2,22	-1,90	-4,80
3.	PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk. (PSDN)	6,26	-	-7,44	-13,14
4.	PT. Sekar Laut Tbk. (SKLT)	6,15	8,19	10,75	13,20

Sumber: Laporan keuangan, data diolah Th. 2017

Penelitian ini tertarik untuk dilakukan karena adanya beberapa fenomena terkait pertumbuhan dan kinerja keuangan *food and beverages* saat ini. Pada kinerja keuangan ditemukan ada beberapa perusahaan *food and beverages* yang mengalami penurunan atau kenaikan pada tiap tahunnya selama 4 tahun yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 penurunan kinerja keuangan oleh perusahaan PT. Akasha Wira Internasional Tbk. (ADES), PT. Tri Banyan Tirta Tbk. (ALTO), dan PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk (PSDN). Sedangkan peningkatan kinerja keuangan ditunjukkan pada perusahaan PT. Sekar Laut Tbk (SKLT).

Data kementerian perindustrian (www.kemenperin.go.id) menunjukkan, pada pertumbuhan *food beverages* tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan perindustrian makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,57%, dan 3,34 % pada tahun 2013 sehingga mengalami penurunan pertumbuhan. Didapat ada tujuh permasalahan pokok yang menghambat pertumbuhan industri makanan dan minuman, yaitu:

- (1) Ketersediaan bahan baku hasil pertanian lebih difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku hasil pertanian untuk industri, belum mampu dipenuhi dari hasil produksi pertanian dalam negeri.
- (2) Volume pasokan bahan baku hasil pertanian dalam negeri yang terbatas, diperparah dengan suatu kondisi mutu yang tidak seragam dan jaminan pengiriman yang tidak menentu serta dengan harga yang lebih mahal
- (3) Belum berkembangnya industri pascapanen untuk memasok bahan baku industri hilir makanan dan minuman.
- (4) Higienitas perorangan dan sanitasi pengolahan baik untuk industri makanan dan minuman skala menengah dan besar maupun skala rumah tangga.
- (5) Masih ada yang menjual tanpa izin edar, makanan dan minuman yang rusak, makanan dan minuman yang kadaluwarsa, dan menjual dengan label yang tidak masuk kriteria (TMK) keamanan pangan.
- (6) Masih banyak industri makanan dan minuman skala menengah dan besar yang tidak mencantumkan kode produksi, komposisi, tanggal kadaluwarsa, nama dan alamat produsen, klaim yang menyesatkan, tidak mencantumkan logo atau tulisan halal serta tidak menggunakan bahasa Indonesia.

- (7) Dari sisi iklan masih banyak industri makanan dan minuman yang melakukan pelanggaran berupa iklan terkait klaim gizi dan kesehatan (menjurus ke pengobatan), iklan dengan klaim yang menyesatkan, dan iklan yang mencantumkan logo yang tidak berhubungan dengan nama produk.

Menurut Abdul Rochim (2016) di Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Terkait pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia dituntut untuk memiliki industri dalam negeri yang berdaya saing tinggi agar tidak sekedar menjadi pasar negara-negara tetangga. Salah satu sektor yang dapat menjadi andalan masa depan dan masih mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah industri makanan dan minuman (mamin). Hal ini karena didukung dengan adanya sumber daya alam yang cukup potensial dari berbagai macam sektor yaitu, sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Sehingga dibutuhkan kesiapan daya saing industri makanan dan minuman memasuki pasar bebas ASEAN atau MEA yang merupakan kunci utama untuk memenangkan persaingan. Adapun program-program yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan industri makanan minuman untuk kedepannya sekaligus menjadi solusi dalam menghadapi ancaman pokok yang terjadi, yaitu:

- (1) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang ahli & berkompeten di bidang industri makanan dan minuman melalui diklat industri dan dilakukan pendampingan.
- (2) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi.
- (3) Dalam meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan *Good Hygiene Practices (GHP)*, *Good Manufacturing Practices (GMP)* dan *Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)*, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk makanan dan minuman.

- (4) Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk makanan dan minuman.
- (5) Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan makanan dan minuman dengan nilai tambah kecil.
- (6) Kementerian perindustrian akan memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri makanan minuman dalam skala kecil dan menengah.
- (7) Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor.
- (8) Melakukan promosi dan perluasan pasar produk industri makanan dan minuman di dalam maupun luar negeri.
- (9) Memfasilitasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam rangka penerapan label halal.

Menyambut dunia baru dengan masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015, OJK (otoritas jasa keuangan) meluncurkan sebuah peta arah GCG (*Good Corporate Governance*) di Indonesia untuk 2 tahun mendatang. Tujuannya agar perusahaan publik di Indonesia dapat sejajar dengan perusahaan di kawasan ASEAN. Untuk mendukung peluncuran peta arah GCG tersebut, maka diperlukan regulasi dan aturan-aturan sebagai dasar hukumnya. OJK telah mempersiapkan 33 aturan yang wajib diikuti oleh perusahaan publik. Aturan-aturan tersebut terkait kerangka kerja GCG, hak-hak pemegang saham, peran para pemangku kepentingan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Penerapan GCG perusahaan yang baik dapat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya krisis dan kegagalan, atau GCG yang lemah dapat menimbulkan terjadinya krisis keuangan global seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan 2008 lalu.

Saat ini *good corporate governance* bukan lagi pilihan, melainkan merupakan kebutuhan atau kewajiban yang sudah menjadi tuntunan masyarakat termasuk organisasi bisnis dengan aturan-aturan dan regulasi yang mengatur

bagaimana penerapan GCG dalam mengelola manajemen perusahaan. Bagi Indonesia, perkembangan mengenai regulasi *corporate governance* bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independen dan membentuk komite audit pada tahun 1998, *Corporate Governance* (CG) mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia.

Menghadapi daya saing industri yang cukup ketat dibutuhkan langkah-langkah strategis, salah satunya yaitu penerapan tata kelola perusahaan dengan baik. Saat ini *good corporate governance* bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan dan kewajiban bagi perusahaan yang sudah menjadi tuntunan masyarakat termasuk organisasi bisnis. Salah satu penerapan dan pengelolaan *good corporate governance* yang baik dengan menjadi perusahaan yang transparan, yang memiliki kewajiban untuk menunjukkan dan mengungkapkan hal apapun terkait informasi kinerja keuangan perusahaan dengan benar, akurat dan tepat waktu, sehingga dapat menjadi alat untuk meyakinkan para pemegang saham dalam menanamkan investasinya ke perusahaan.

Kinerja keuangan menurut Irham (2011:2) adalah suatu analisis yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan telah menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisi keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja

dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kinerja perusahaan menurut Jones, et al. (2009) memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang. Kinerja perusahaan menggambarkan prestasi kerja perusahaan. Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah *Return on Equity* (ROE). ROE adalah ukuran profitabilitas perusahaan penting yang mengukur pengembalian untuk pemegang saham.

Penilaian kinerja adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik (Srimindarti, 2006:34). Penilaian kinerja merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab dalam melaporkan kinerja, aktivitas dan sumber daya apa saja yang telah dipakai, dilakukan dan telah dicapai. Hal ini berhubungan dengan aspek-aspek manajemen yang tidak sedikit jumlahnya, maka keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dan dinilai melalui berbagai macam variabel atau indikator yang mempengaruhi kinerja keuangannya. Namun, secara umum penilaian kinerja juga dapat dilakukan dengan berfokus pada sistem informasi akuntansinya atau informasi kinerja berupa laporan keuangan. Laporan keuangan sangat bermanfaat untuk membantu kreditur, investor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam pembuatan keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta dalam menentukan prospek dimasa yang akan datang.

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan salah satunya adalah dewan komisaris. Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada dewan direksi

untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). *Corporate governance* perlu berperan sebagai monitoring dalam menyelesaikan masalah keagenan. Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan *principal* dan manajer di dalam perusahaan dalam pengambilan keputusan keagenan (Jensen dan Meckling, 1976).

Dewan direksi menurut (iqbal, 2012) bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal, dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (Pujiati dan Widanar, 2009). Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan saham oleh manajer setara dengan kepentingan manajer dan pemegang saham karena dengan memiliki saham di perusahaan tersebut, manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang

diambilnya, dan jika terjadi kesalahan maka manajer juga akan menanggung kerugian. Hal ini merupakan insentif bagi manajer dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan berusaha lebih hati-hai dalam pengambilan keputusan.

Dewan direksi menurut Hardikasari (2011) adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan dalam menjalankan usaha, yang akan mengambil strategi perusahaan secara jangka pendek atau jangka panjang. Dewan direksi merupakan pusat pengendalian dalam perusahaan, bertanggung jawab atas segala bentuk operasional dan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan suatu perusahaan.

Masalah kebijakan dividen menurut Easterbrook (1984) berkaitan dengan masalah keagenan. Salah satu pihak yang menetapkan alokasi dividen adalah seorang manajer, sebaiknya perusahaan menetapkan kebijakan dividen yang rendah agar memiliki sumber dana internal yang relatif lebih murah dibandingkan utang atau emisi saham baru. Namun pada kenyataannya, manajer juga terlibat dalam kepemilikan saham sehingga terkadang manajer menginginkan return dalam bentuk dividen. Apabila perilaku manajer menyukai dividen rendah, maka perusahaan akan memiliki laba ditahan yang relatif tinggi. Namun apabila menyukai dividen besar, maka perilaku manajer mengarah pada *bird in the hand theory*, sebagai dampaknya perusahaan memiliki sumber dana internal relatif rendah.

Agency Theory dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara manajer (*agent*)

dengan investor (*principal*). *Principal* adalah pemegang saham, sedangkan yang dimaksud dengan agen adalah manajemen yang mengelolah perusahaan. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Anthony dan Govindarajan, 2005). Masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak berusaha untuk mendapatkan yang terbaik bagi diri mereka sendiri, maka hal tersebut menimbulkan konflik. Hubungan agen terjadi ketika pelaku menyewa agen untuk melakukan tugas atas nama pemilik. Pemilik pada umumnya mendelegasikan pengambilan keputusan wewenang kepada agen. *Agency theory* berkaitan dengan penyelesaian masalah yang timbul dalam hubungan keagenan yaitu diantara pemilik (misalnya pemegang saham) dan agen dari para pemilik (misalnya eksekutif perusahaan).

Masalah ini timbul karena ketika terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), antara pemilik dengan agen. Akan tetapi meski terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan agen, masing-masing pihak harus dapat berkomitmen sesuai dengan kontrak yang telah disepakati (William 2003). Untuk mengurangi konflik atau masalah keagenan, diperlukan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, Salah satu mekanisme yang dipakai adalah GCG. GCG menjadi sistem yang memberikan petunjuk dan prinsip untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan, terutama kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham (El-Chaarani,2014). Hal ini sesuai dengan *Agency Theory*, dengan meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi, diharapkan agen

dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu meningkatkan return perusahaan sehingga kinerja perusahaan meningkat (Melia dan Yulius, 2015)

Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Ariefatun (2015), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Melia dan Yulius (2015) ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian Melia dan Yulius (2015), hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariefatun (2015) dan Chaerunisa dan Farah (2014), tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaira Amalia (2011) dimana hasil menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Melia dan Yulius (2015) memberikan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Joko dan C. Ambar (2012) memberikan hasil penelitian bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, dimana perusahaan yang tidak membayar dividen maka kinerja perusahaan akan lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan yang membayar dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Khaira (2011) memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan struktur modal, ukuran perusahaan, dan *agency cost* terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan masih banyak perbedaan, maka dari itu peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan kebijakan dividen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur *food and beverages* di BEI tahun 2012-2015.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. **Bagi Perusahaan**, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menentukan strategi *positioning* pada masa yang akan datang.

2. **Bagi Manajemen**, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen agar dapat mengelola bagian manajemennya supaya dapat meningkatkan kinerjanya.
3. **Bagi Peneliti**, diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan acuan dan referensi bagi penelitian yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini menjelaskan isi dari masing-masing bab yang meliputi sub bab sub bab yang akan ditulis :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab pendahuluan akan menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan sebagai pembahasan dari penulisan ini yang meliputi pengertian kinerja keuangan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, definisi secara teori mengenai faktor-faktor independen, hipotesis dan kerangka pemikiran yang akan diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi penelitian, definisi operasional, pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan

metode pengumpulan data, serta teknis analisis yang digunakan. Pada bab ini juga akan menguraikan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subjek penelitian dan analisis data yang meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis serta pembahasan dari hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan dapat mengemukakan keterbatasan dalam penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya.

